



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 25 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Xxxxi, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 26 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Ipi, 08 Agustus 1994, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Kediaman di Xxxxi, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 13 November 2020, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 202/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal 13 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxx Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Xxxxi dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang sekaligus menikahkan serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 4.1. xxxx, umur 3 tahun;
 - 4.2. xxxx, umur 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum lainnya;

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2014;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Xxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014 di Xxxxi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan C.q. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil mereka yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tanggal 30 November 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Abd.Majidsi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tertanggal 30 November 2020 namun tidak datang ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg dan Pasal 77 Rv permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena pelaksanaan persidangan Itsbat Nikah ini dilakukan secara terpadu bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Jum'at** tanggal **4 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu **Sugeng Effendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Fauzi Prihastama, S.Sy.,
Panitera Pengganti,

Sugeng Effendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2020/PA.Buk